

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Pengungkapan

Secara sederhana pengungkapan dapat diartikan sebagai penyampaian informasi. Dengan adanya laporan keuangan maka pihak yang berasal dari luar manajemen, dapat melihat kondisi perusahaan. Banyaknya informasi yang diperoleh tergantung dari seberapa banyaknya perusahaan mengungkapkan informasi pada laporan keuangan. Pengungkapan merupakan penjabaran informasi dalam bentuk laporan keuangan atau media komunikasi pendukung lainnya mengenai suatu Perusahaan. Menurut (Chariri, A dan Ghozali, 2007) istilah disclosure berarti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Menurut (Evans, 2003), pengungkapan adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pengungkapan dapat dilihat dari dua aspek yaitu, data dan laporan keuangan. Apabila terkait dengan data, maka pengungkapan harus berisi informasi yang bermanfaat untuk pihak yang membutuhkan. Sedangkan jika terkait dengan laporan keuangan, maka pengungkapan harus berisi informasi dan penjelasan yang cukup berkaitan dengan hasil aktivitas dari perusahaan. Oleh karena itu pengungkapan harus berisikan informasi untuk memenuhi fungsi data dan laporan keuangan.

Pengungkapan dalam pengertian akuntansi terarah pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan, dimana informasi yang diberikan pada laporan keuangan berisi laporan arus kas, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan dan laporan-laporan yang terkait laporan keuangan itu sendiri. Pengungkapan dapat dilihat dari data, maka pengungkapan tersebut harus berisi informasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Maka, pengungkapan harus berisi informasi yang dapat memenuhi fungsi data dan juga laporan keuangan, yaitu pengungkapan yang bersifat dapat menjelaskan informasi dari aktivitas sebuah perusahaan dan isinya harus bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Ada tiga

konsep yang tidak boleh lepas dari pengungkapan (*disclosure*) diantaranya adalah:

(1) untuk siapa informasi diungkap (2) apa tujuan informasi tersebut. (3) berapa banyak informasi diungkap. Perusahaan yang aktif dalam memberikan informasi mengenai perusahaannya, akan mendapatkan respon yang positif dari para pemangku kepentingan apabila Perusahaan melakukan pengungkapan dengan baik. Dari perspektif ekonomi Perusahaan akan melakukan hal apapun termasuk mengungkapkan informasi yang akan menambah nilai positif untuk perusahaannya. *Disclosure* dapat digunakan untuk mengatasi informasi asimetris, melalui publikasi laporan keuangan yang didalamnya terdapat pengungkapan, pasar dapat menilai sejauh mana perusahaan telah mengungkapkan informasi yang relevan. Jika semua informasi relevan telah diungkapkan, maka informasi asimetris seharusnya telah berkurang. Sejumlah penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa *disclosure* mempunyai hubungan yang signifikan dengan informasi asimetris, dalam hal kemampuannya untuk mengurangi informasi asimetris. (D. và Verrecchia, 1991) menyatakan bahwa pengungkapan (*disclosure*) akan mengurangi informasi asimetris. Pernyataan ini didukung oleh penelitian (Greenstein, M.M., 1994), yakni informasi asimetris berkurang dengan adanya *disclosure*.

SFAS 105 (paragraf 71-86) yang dikeluarkan oleh FASB dalam Johnson (1992) menyebutkan adanya empat tujuan dari *disclosure*, yakni:

- Menggambarkan item yang diakui dan menyediakan pengukuran yang relevan untuk item itu selain pengukuran yang terdapat dalam laporan keuangan.
- Menggambarkan item yang tidak diakui dan menyediakan pengukuran yang berguna untuk item yang tidak diakui tersebut.
- Menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditur dalam mempertimbangkan risiko dan potensi dari item yang diakui dan tidak diakui.
- Menyediakan informasi interim yang penting disaat isu-isu akuntansi lainnya masih sedang dipelajari secara lebih mendalam.

2.1.1 Jenis-jenis Pengungkapan dalam Akuntansi Manajemen Strategis

1. Pengungkapan Cukup (*Adequate disclosure*)

Pengungkapan cukup meruakan pengungkapan minimum yang harus dipenuhi agar informasi yang diberikan tidak menyesatkan penggunaanya dalam mengambil keputusan.

2. Pengungkapan Wajar (*Fair Disclosure*)

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan yang harus diperoleh agar informasi yang didapatkan oleh semua pihak adalah sama.

3. Pengungkapan Penuh (*Full Discovery*)

Pengungkapan penuh merupakan pengungkapan yang harus dilakukan secara menyeluruh atas informasi yang relevan dalam mengambil keputusan.

4. Pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan dari laporan keuangan yang di dalamnya diwajibkan oleh Bapepam dan LK melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-38/PM/1996 kemudian direvisi dalam Peraturan Bapepam No. KEP-134/BL/2006 tanggal 7 Desember 2006 dan Ikatan Akuntansi Indonesia.

5. Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan. Pengungkapan sukarela yang termasuk dalam kategori ini adalah pengungkapan tambahan mengenai informasi keuangan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. pengungkapan sukarela biasanya diungkapkan dalam bentuk laporan tahunan (*annual report*), tetapi sekarang banyak perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosisal perusahaan yang terpisah dari laporan tahunan dalam bentuk laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Pengungkapan akuntansi manajemen strategis umumnya masuk

kedalam kategori pengungkapan sukarela, meskipun trend regulasi keberlanjutan mulai mewajibkan beberapa aspek strategis untuk diungkapkan.

2.2 Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Istilah Akuntansi Manajemen Strategis pertama kali di definisikan oleh (Simmonds, 1982) yang mendefinisikan akuntansi manajemen strategis sebagai penyediaan dan analisis data akuntansi manajemen tentang bisnis dan pesaingnya untuk digunakan dalam mengembangkan dan memantau strategi bisnis. Menurut (Maryati et al., 2023) akuntansi manajemen strategis merupakan akuntansi manajemen yang menekankan pada informasi yang bersifat internal dan eksternal, sekaligus informasi yang bersifat nonkeuangan. Pengungkapan dan kegiatan praktik Akuntansi Manajemen Strategis perusahaan berfungsi sebagai faktor pendorong dalam mengurangi biaya, mencapai efisiensi operasional, dan meningkatkan produktivitas karena memungkinkan perusahaan menarik bakat yang lebih baik dan memotivasi karyawan (Simmonds, 1982).

Tujuan utama akuntansi manajemen strategis adalah menyediakan informasi keuangan atau non keuangan yang relevan dan berguna bagi manajemen organisasi untuk perencanaan, pengukuran kerja, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, terdapat perspektif dalam menerapkan akuntansi manajemen strategis suatu perusahaan : penerapan teknik akuntansi manajemen strategis dan kinerja peran serta keterlibatan akuntansi perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis (Setiawan & Iskak, 2023). Keputusan strategis yang dimaksud adalah keputusan yang harus diambil oleh perusahaan terkait dengan masa depan perusahaan dalam jangka panjang, tidak hanya satu bulan atau satu tahun mendatang. Masa depan yang tidak ada kepastian ini ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam lingkungan eksternal, yang dapat menjadi peluang atau ancaman bagi organisasi.

(Brouthers & Roozen, 1999) menunjukkan bahwa fungsi dari sistem akuntansi strategis yaitu sebagai alat analisis lingkungan, generasi alternatif strategis,

pemilihan alternatif strategis, perencanaan pelaksanaan strategis, implementasi rencana strategis serta sebagai proses pengendalian manajemen strategis. Dengan demikian, pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis akan mengurangi asimetri informasi dengan membantu investor dalam mengevaluasi kegiatan perusahaan serta hubungannya dengan lingkungan perusahaan (Simmonds, 1982).

2.2.1 Regulasi Yang Mengatur Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Di Indonesia pengungkapan akuntansi manajemen strategis belum diatur secara spesifik dan eksplisit dalam regulasi yang berdiri sendiri, sebagaimana regulasi yang mengatur untuk laporan keuangan konvensional. Pengungkapan laporan keuangan emiten atau publik di atur dalam OJK NOMOR: KEP-347/BL/2012 TENTANG PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK. Peraturan Nomor VIII.G.7 Tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, peraturan ini tentang pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang harus diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik. Peraturan ini mencakup struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan serta pengungkapan yang tidak diatur dalam peraturan harus mengikuti standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Namun, berbagai regulasi OJK, BEI, serta prinsip GCG dan keberlanjutan, dan kewajiban keterbukaan informasi bagi perusahaan publik, telah membuka ruang dan secara tidak langsung dapat mendorong pengungkapan informasi strategis yang selaras dengan praktik akuntansi manajemen strategis. Seperti, strategi jangka panjang, analisis kompetitor dan resiko bisnis, alokasi sumber daya berdasarkan nilai tambah, dan peran dewan dalam pengawasan strategis. Perusahaan di Indonesia didorong untuk dapat mengungkapkan informasi strategis yang semula bersifat sukarela menjadi semakin normatif. Teori pengungkapan memberikan kerangka logis mengapa perusahaan merespons tekanan regulatif dan ekspetasi pasar untuk semakin transparan dalam aspek strategis. Berikut regulasi tersebut :

Tabel 2.1**Regulasi Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis**

No	Regulasi	Lembaga/ Instansi	Isi Pokok Regulasi	Relevansi Terhadap AMS
1	POJK No. 29/POJK.04/2016	OJK	Kewajiban penyampaian Laporan Tahunan emiten yang mencakup strategi bisnis, risiko usaha, dan prospek perusahaan	Mendorong pengungkapan strategi jangka panjang dan analisis manajerial
2	POJK No. 51/POJK.03/2017	OJK	Mewajibkan penyusunan Laporan Keberlanjutan bagi perusahaan, termasuk strategi keberlanjutan dan pengelolaan risiko sosial-lingkungan	Mendorong integrasi informasi non-keuangan dan perencanaan strategis
3	Peraturan BEI I-E	BEI	Emiten wajib mengungkapkan informasi material dan aksi korporasi yang memengaruhi nilai dan arah strategis perusahaan	Mewajibkan keterbukaan atas keputusan strategis dan proyeksi usaha
4	Pedoman Umum GCG (KNKG, 2006)	KNKG	Mendorong transparansi dalam pengungkapan informasi strategis, risiko, dan arah jangka panjang	Menekankan akuntabilitas strategi dan pengawasan oleh dewan direksi
5	PSAK 68	SAK- IAI	Penyajian laporan keuangan dan pengukuran nilai wajar membuka ruang bagi pengungkapan informasi tambahan	Mendukung penyajian informasi strategis berbasis nilai dan manajerial

2.2.2 Item-item yang di Ungkapkan Dalam Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Dalam mengungkapkan Akuntansi Manajemen Strategis terdapat 42 item yang digunakan sebagai standar untuk menilai informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021-2023. Indeks

Akuntansi Manajemen strategis dikategorikan kedalam tiga kelompok jenis informasi, yaitu informasi strategis, informasi Non keuangan, dan informasi keuangan.

2.2

Tabel Informasi

Tipe Informasi	Jumlah Indikator
A. Informasi Strategis	
- Tujuan Perusahaan	8
- Penelitian & Pengembangan	5
- Manajemen Perusahaan	5
- Model Strategi Bisnis	1
- Budaya Perusahaan	1
Total Indikator Informasi Strategis	20
B. Non-Financial Information	
- Informasi terkait direksi & komisaris	2
- Informasi karyawan	2
- Rantai Pasik	6
- Keterbatasan	2
- Anti-Korupsi	1
- Manajemen Produk	4
- Manajemen Pelanggan	1
Total Indikator Informasi Non-Keuangan	18
C. Informasi Keuangan	
- Kinerja Perusahaan	1
- Kinerja Direksi Perusahaan Total Indikator Informasi	3
Keuangan	4
Total Indikator Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis	42

2.3 Independent Board

Independent Board merupakan dewan independent yang merujuk pada dewan komisaris perusahaan yang berasal dari luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham serta kepentingan, bagi para *stakeholder* Perusahaan. Dewan komisaris merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena bertindak untuk mengawasi jalannya sebuah perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 /POJK.04/2014 mengenai Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi pihak yang berada di luar manajemen entitas. Semakin banyak proporsi komisaris independen di dalam perusahaan maka manajemen perusahaan tidak dapat melakukan kecurangan sehingga kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan dapat mendorong dalam meningkatkan kinerja entitas, maka dapat mengurangi potensi konflik yang berkepanjangan dari berbagai pihak pemangku kepentingan, yang akhirnya memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat.

Tujuan dengan adanya komisaris independen yaitu guna menyeimbangkan keputusan di suatu rapat tertentu pada perusahaan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait (Lukman & Geraldine, 2020). Dalam hal ini komisaris independen memiliki pengaruh langsung terhadap integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, jika melihat dari fungsinya komisaris independen harus melindungi dan mengawasi pihak-pihak yang berada diluar manajemen, komisaris independen juga diminta untuk menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi antara manajer internal dan memberikan nasihat kepada manajemen dan mengawasi kebijakan yang dibuat oleh manajemen. Keanggotaan dewan komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 20, sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan

Komisaris.

2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau Presiden Komisaris.

2.3.1 Persyaratan Dewan komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), Yaitu pasal 97 UUPT, komisaris bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Disamping itu UUPT menyatakan bahwa orang yang dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris adalah perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum, tidak pernah dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya menjadi anggota dewan komisaris.

Menurut peraturan Bursa Efek Jakarta komisaris independen memiliki beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut :

- a. Komisaris independent tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali.
- b. Komisaris independent tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya pada perusahaan bersangkutan yang tercatat.
- c. Komisaris independent tidak memiliki kedudukan rangkap dalam perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Komisaris independent harus mengerti peraturan perundang-undangan pada bidang pasar modal.
- e. Komisaris independent diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang merupakan bukan pemegang saham pengendali pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2.4 Gender On Board

Gender on board merujuk pada konsep keberagaman gender dalam pimpinan atau anggota di dalam sebuah Perusahaan. menurut (Smith & Rogers, 2000) perempuan juga dianggap lebih mampu bertindak secara etis dan lebih mengutamakan suatu etika dibandingkan laki-laki, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya suatu bentuk pelanggaran atas kebijakan organisasi pada suatu perusahaan. Keberadaan wanita di dalam posisi kepemimpinan dapat mempromosikan keberlanjutan dan kinerja lingkungan yang lebih baik.

Studi yang dilakukan oleh (Ingersoll et al.,2023) menemukan bahwa kepemimpinan wanita dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja lingkungan Perusahaan. Dengan adanya keberagaman gender dapat memberikan atmosfer pekerjaan yang lebih baik. Salah satu masalah yang sering terjadi pada suatu perusahaan yaitu dalam mengambil keputusan. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan adanya keberagaman gender di dalam perusahaan. Eksistensi wanita dalam jajaran anggota dewan dapat memberikan pandangan yang berbeda serta dapat menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan yang menimbulkan resiko negatif. Hal ini dapat menyebabkan investor membuat keputusan yang salah dan memberikan investasi mereka dengan kurang tepat. Keberagaman gender di tempat kerja mengacu pada perpecahan antara laki-laki dan wanita yang berdampak pada cara rekan kerja berinteraksi satu sama lain, seberapa efektif kinerja organisasi, dan faktor lainnya (Eliya & Suprpto, 2022). Perusahaan akan memperoleh manfaat dengan kehadiran wanita di dewan komisaris, karena wanita dapat berkontribusi secara efektif dalam menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi dan dapat mencegah kemungkinan penipuan laporan keuangan. Oleh karena itu, susunan dewan komisaris wanita yang anggotanya berasal dari luar perusahaan cenderung berdampak pada kinerja yang dicapai perusahaan (Hana et al., 2022).

2.5 Trade Off

Trade off merupakan konsep yang merujuk pada situasi dimana seseorang atau organisasi harus membuat pilihan antara dua atau lebih alternatif, apabila memilih satu alternatif berarti mengorbankan yang lain. Dalam hal ini *trade off* mencerminkan hubungan antara keuntungan dan kerugian terkait dengan setiap

keputusan yang diambil. *Trade off* dapat muncul dalam mengambil keputusan terkait struktur modal, dimana perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya utang dan manfaat pajak yang diperoleh dari utang tersebut. Menurut (Azazi, 2008), dalam memilih struktur modal optimal, perusahaan mempertimbangkan manfaat dan biaya antara utang dengan ekuitas. Literatur tentang struktur modal yang optimal berkenaan dengan kontinjensi (persyaratan) yang khusus bagi setiap sumber pendanaan yang pada gilirannya menentukan manfaat dan biaya dari masing-masing sumber dana tersebut. Sundjaya dan Berlian (2002) menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal didasarkan atas keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan dengan pinjaman. Dalam konteks ini *Trade off* merupakan gabungan dari biaya kepemilikan (*proprietary cost*) dan biaya modal (*cost of capital*). *Trade off* menunjukkan pertimbangan antara pengeluaran yang dimiliki dan terkait dengan pengungkapan, perusahaan cenderung menahan informasi. Hal ini dapat menyebabkan investor memberikan reaksi yang negatif terhadap informasi yang ditahan. Maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara sukarela.

Ketika perusahaan memilih untuk menahan informasi, investor sering kali memberikan reaksi yang negatif, karena investor mungkin merasa curiga atau tidak puas terhadap manajemen, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham dan merusak reputasi perusahaan. Maka perusahaan harus memiliki kebijakan pengungkapan yang jelas dan komunikasi yang baik kepada investor.

2.5.1 Proprietary Cost

Menurut (Tarigan, 2018) mendefinisikan *proprietary cost* sebagai biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan sebagai akibat dari pengungkapan informasi secara sukarela, yang mana informasi tersebut dapat diketahui dan digunakan oleh pesaing sehingga dapat membahayakan posisi kompetitif perusahaan dan mengurangi atau merugikan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Keberadaan kompetitor dan pendatang potensial dalam pasar produk mengakibatkan adanya *proprietary cost* yang terlibat dalam keputusan untuk mengungkapkan informasi (Luksandy, 2015). Berdasarkan penelitian (R. E. Verrecchia, 1983), semakin tinggi *proprietary cost* yang terkait dengan pengungkapan, perusahaan cenderung menahan informasi. Hal

ini dapat menyebabkan investor memberikan reaksi yang negatif terhadap informasi yang ditahan. Maka akan semakin rendah kemungkinan perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara sukarela.

Ketika perusahaan memilih untuk menahan informasi, investor sering kali memberikan reaksi yang negatif, karena investor mungkin merasa curiga atau tidak puas terhadap manajemen, yang dapat menyebabkan penurunan harga saham dan merusak reputasi perusahaan. Maka perusahaan harus memiliki kebijakan pengungkapan yang jelas dan komunikasi yang baik kepada investor.

2.5.2 Cost Of Capital

Cost of capital merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan untuk biaya operasional dari kegiatan investasi perusahaan. *Cost of capital* digunakan untuk mengevaluasi investasi atau proyek baru dan memastikan bahwa Perusahaan menghasilkan keuntungan yang memadai untuk menutupi biaya pendanaan tersebut. (Mardiyah, 2002.) mendefinisikan *cost of capital* sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sumber pembelanjaan (*source of financing*). Biaya modal merupakan tingkat pengembalian seluruh investasi perusahaan yang meliputi seluruh tingkat pengembalian yang di syaratkan oleh pemegang saham. Dalam penilaian investasi terdapat komponen penting yang terletak pada biaya modal karena pemaksimuman nilai pemegang saham menghendaki semua biaya input termasuk modal diminimumkan, maka itu biaya modal harus diestimasi. Biaya modal yang tepat digunakan untuk semua keputusan adalah rata-rata tertimbang dari seluruh komponen modal. Tetapi tidak semua komponen modal di perhitungkan dalam menentukan *Weighted Average Cost of Capital*. Biaya modal harus dihitung berdasarkan suatu basis setelah pajak (*after tax basis*) karena arus kas setelah pajak adalah yang paling relevan untuk keputusan investasi. Menurut (Warsono, 2002), bahwa biaya modal dapat di definisikan sebagai biaya peluang atas penggunaan dana investasi untuk di investasikan dalam proyek - proyek baru.

2.5.2.1 Komponen Cost Of Capital

1. Biaya utang (*Cost of debt*)

Cost of debt merupakan bunga yang harus dibayar oleh perusahaan atas utang, biasanya bunga yang dimiliki oleh Perusahaan.

2. Biaya Ekuitas (*Cost equity*)

Cost equity merupakan pengembalian yang diharapkan pemegang saham atas investasi yang dimiliki dalam Perusahaan.

3. *Weighted Average Cost of Capital (WACC)*

Weighted Average Cost of Capital merupakan rata-rata tertimbang dari *cost of debt* dan *cost of equity*, yang dimana proporsi masing-masing dalam struktur modal perusahaan diperhitungkan.

2.5.1.2 Faktor-faktor yang menentukan Cost Off Capital

Menurut (Warsono, 2002), besar kecilnya biaya modal baik untuk perusahaan atau proyek khusus di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penting yang mempengaruhi biaya modal antara lain:

1. Keadaan-keadaan umum perekonomian. Kondisi ekonomi secara makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi sangat mempengaruhi biaya modal. Faktor ini juga menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko.
2. Kondisi pasar (Daya jual saham suatu perusahaan). Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah.
3. Keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan utang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat hasil minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat.
4. Besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal perusahaan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi dan juga pedoman dalam melakukan penelitian ini:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

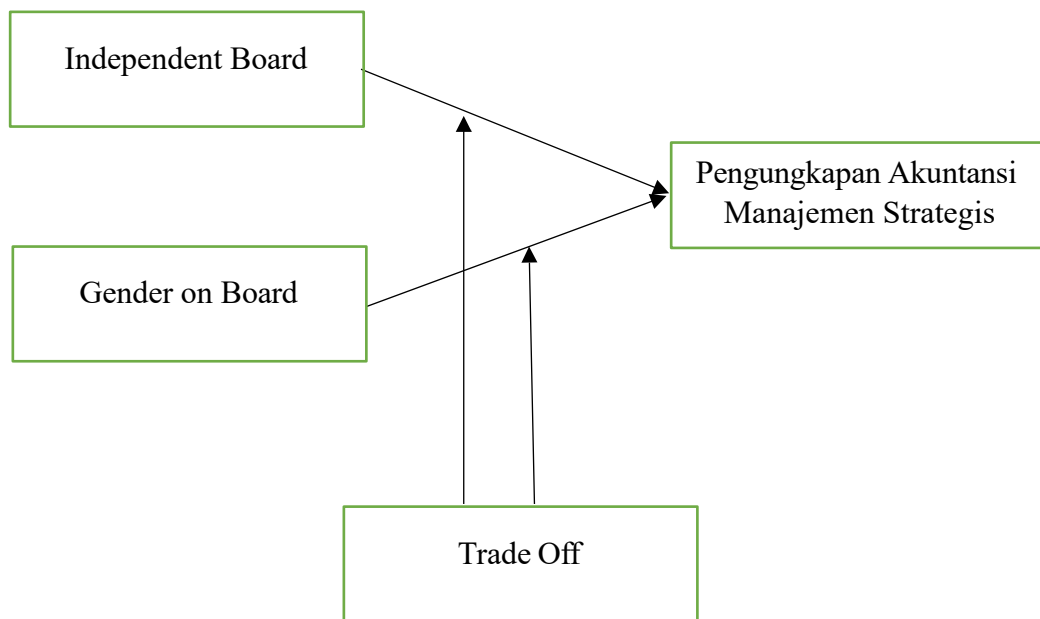
No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Honggowati et al., 2023)	Independent Board Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis: Peran Proprietary Cost & Cost of Capital Sebagai Variabel Moderasi	Y : pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis X : Independent Board	bahwa <i>independent boards</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntansi manajemen strategis ketika adanya <i>trade-off</i> antara manfaat dan biaya pelaporan Akuntansi manajemen startegis bagi pemegang saham, <i>proprietary cost</i> tidak mempengaruhi hubungan antara <i>independent boards</i> dan pengungkapan Akuntansi manajemen strategis
2	(Honggowati et al., 2019)	Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis, Struktur Kepemilikan, dan Karakteristik Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia		

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan struktur atau diagram yang menjelaskan mengenai alur logika dan pola pikir dalam penelitian atau penulisan. Kerangka pemikiran dapat membantu peneliti atau penulis dalam memahami dan mengorganisir ide, serta memudahkan dalam mengembangkan argumen dan memecahkan masalah.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan secara empiris hubungan variabel dependen pengungkapan akuntansi manajemen strategis dengan variabel independen yaitu *independent board*, *gender on board*. Dari hasil uraian tersebut peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



2.8 Bangunan Hipotesis

2.8.1 Pengaruh Independent Board Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Sesuai dengan peran dewan komisaris independen dalam dewan komisaris adalah memonitor peningkatan objektivitas dan independen dalam dewan dengan tujuan untuk mencegah munculnya biaya agensi, sehingga keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Diono et al., 2017). Dewan independen berfungsi sebagai pengawas akuntabilitas dan transparansi dalam pengungkapan informasi manajemen strategis, dan juga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Luksandy, 2015) menyatakan bahwa

independent board berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntansi manajemen strategis

H1: *Independent Board* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntansi manajemen strategis.

2.8.2 Pengaruh Gender On Board Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

(Poletti-Hughes & Briano-Turrent, 2019) menyatakan bahwa wanita membawa pengalaman profesional dan perspektif yang berbeda dibandingkan dengan pria, sehingga kehadiran anggota wanita dalam dewan komisaris akan mengarahkan pada tindakan yang lebih informatif dan strategis. Selain itu, Perusahaan yang memiliki Keberagaman *gender* cenderung memiliki Tingkat pengungkapan yang lebih baik dalam transparansi laporan pengungkapan akuntansi, dan dapat meningkatkan reputasi di mata investor.

H2: *Gender on Board* berpengaruh Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis.

2.8.3 Pengaruh Trade Off memoderasi Independent Board Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Indepedent board berfungsi sebagai pengawas yang efektif dalam perusahaan, yang berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ketika perusahaan mengungkapkan informasi maka informasi tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pesaing. (Honggowati et al., 2023) menyatakan bahwa *Independent board* memutuskan untuk meningkatkan pengungkapan akuntansi manajemen strategis tidak terpengaruh dengan adanya fakta bahwa perusahaan dapat membantu saingan dan pihak lain yang akan menggunakan informasi tersebut untuk merugikan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Honggowati et al., 2023) menyatakan bahwa *independent board* berpengaruh positif terhadap pengungkapan akuntansi manajemen strategis dengan adanya *trade off*.

H3: *Trade off* memoderasi *independent board* berpengaruh terhadap pengungkapan akuntansi manajemen strategis.

2.8.4 *Trade Off* memoderasi *Gender on Board* berpengaruh Terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis

Keberadaan komisaris wanita di dalam perusahaan dapat berkontribusi dalam mengambil keputusan, memberikan perspektif yang lebih netral dan kritis. Komisaris wanita juga berpengaruh dalam meningkatkan transparansi dan mengungkapkan akuntansi manajemen strategis yang lebih baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Transparansi yang diberikan perusahaan tidak hanya dapat memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya *trade off* maka transparansi yang dilakukan perusahaan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat dari pengungkapan tersebut.

H4: *Trade off* memoderasi *Gender on Board* terhadap Pengungkapan Akuntansi Manajemen Strategis